

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



PEMKOT DENPASAR KEMBALI TERAPKAN CAR FREE DAY

GOVERNOR ANNOUNCES
TREND OF POSITIVE TOURISM
AND BALI ECONOMY

Hal. 3

TOURIST OBJECT
GLASS BRIDGE
IN GIANYAR
SOON TO BE OPEN

Hal. 11



HAL
5

Transaksi Pasar Rakyat Bali Tembus Rp350 juta

Pasar rakyat yang digagas Tim Penggerak PKK Bali dan kabupaten/kota berhasil mencatatkan transaksi mencapai Rp350 juta, selama tidak lebih dari empat jam setelah dibuka.

“Hingga saat ini penjualan mencapai Rp350 juta. Jadi kami seluruh PKK provinsi maupun kabupaten/kota bergerak untuk melakukan kegiatan seperti ini berawal dari rasa empati kepada seluruh masyarakat,” kata Ketua PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster di Denpasar, Jumat.

Pada pasar rakyat yang ketujuh kali ini, sekitar 106 UMKM Bali bergabung. Dengan tema Berbelanja dan Berbagi, sejak pukul 7.30 WITA para pedagang yang membuka stan di Lapangan Niti Mandala Renon mulai dikerubungi pembeli.

Salah seorang pedagang yang merasakan keuntungan dari berjualan di Pasar Rakyat Provinsi Bali ini adalah Surya Dewi (27). Pedagang sekaligus petani asal

Buleleng tersebut dalam waktu sehari berhasil membawa pulang uang sebesar Rp1,5 juta.

“Ini jualan sayur, buah, dan makanan olahan. Sayangnya produk Bedugul seperti sawi putih saya jual Rp3.000 per kilogram, pokcoy Rp5.000 per kilogram, wortel Rp8.000 per kilogram. Ada juga brokoli, kentang, pisang asal Singaraja dan stroberi Bedugul. Ini penjualannya sampai Rp1,5 juta,” kata dia.

Kepada media, Dewi mengaku biasanya tidak mudah mendapat keuntungan bersih mencapai Rp1 juta, sehingga petani yang menjual hasil pertaniannya langsung itu merasa sangat senang dan terbantu.

“Kalau hari raya bisa dapat Rp750 ribu-Rp1 juta per hari,



Situasi pasar rakyat yang digelar TP PKK Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (2/9/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

tapi hari biasa Rp300 ribu saja. Menurut saya acara ini sangat membantu dan semoga diadakan lagi. Kepada PKK Provinsi Bali saya ucapkan terimakasih,” ujar Surya Dewi.

Selain dagangan hasil pertanian, UMKM lokal turut digandeng TP PKK Provinsi Bali untuk bergabung. UMKM bernama Chio Mart yang menjual produk daging

ayam dan olahan lainnya seperti sosis, bakso, nugget dan kornet penjualannya menembus Rp5 juta dalam waktu singkat.

Salah satu pegawai yang bertugas, Trisa Sulina (26) mengatakan bahwa angka tersebut bahkan tidak dapat tembus di satu toko dalam satu hari, namun melalui pasar rakyat produknya laku keras terutama nugget dan sosis. (ant)

Wagub Bali Minta Masyarakat Jaga Kelestarian Subak



Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (kiri) memberi keterangan soal pelestarian subak di International Field School di Karangasem, Jumat (2/9/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi Bali

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak masyarakat menjaga kelestarian subak yang diakui Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) sebagai warisan budaya dunia terkait sistem pengairan persawahan di daerah itu.

“Mari kita bersama menjaga sistem pengairan tradisional yang sudah sejak dulu digunakan dan memberikan pengairan sawah secara adil dan merata, sekaligus penghidupan kepada petani dan seluruh masyarakat di Bali,” kata dia di Karangasem, Jumat.

Saat membuka sekolah lapan-

gan “8th Bali Internasional Field School For Subak 2022” itu, ia mengatakan keberadaan subak di “Pulau Dewata” --sebutan untuk Bali-- sejak lama dibuktikan dalam sejumlah prasasti. Keaslian sistem organisasi subak sebagai produk budaya juga diperkuat dalam lontar Markandeya Purana.

Ia mengatakan eksistensi subak sebagai lembaga tradisional bersifat sosio, agraris, dan religius hingga saat ini tidak terlepas dari keyakinan masyarakat Bali terhadap konsep Tri Hita Karana.

“Konsep Tri Hita Karana adalah sebuah filosofi harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan alamnya,” ujar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang sering dipanggil Cok Ace itu.

Ia mengatakan sawah di Bali menjadi tempat yang disucikan,

mengingat diyakini sebagai tempat “berstana” Dewi Sri, simbol kemakmuran. Upaya menyucikan kawasan subak dilakukan dengan berbagai upacara berdasarkan agama Hindu.

Wagub Cok Ace yang berasal dari Ubud tersebut, mengatakan upaya lain menjaga subak melalui peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak. Pada 29 Juni 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

“Sepertinya hal ini tidak berlebihan mengingat masih terjaganya keindahan alam Bali serta keluhuran budayanya hingga saat ini sangat jarang ditemukan di daerah lain,” katanya di hadapan para delegasi World Planning School Longress dan Asian Planning School Association Longress. (ant)

Gubernur Umumkan Tren Positif Pariwisata dan Ekonomi Bali

GUBERNUR Bali Wayan Koster mengumumkan sejumlah tren positif yang dialami Bali setelah pandemi COVID-19 melandai, seperti peningkatan kunjungan wisatawan hingga pertumbuhan ekonomi.

“Perkembangan pandemi COVID-19 di Bali semakin membaik, jumlah kasus baru terus menurun dengan konsisten, jumlah yang masuk ke rumah sakit semakin menurun, jumlah yang sembuh semakin meningkat, dan jumlah yang meninggal mendekati nol,” kata Koster di Denpasar, Senin.

Hal tersebut juga diikuti dengan pencapaian vaksinasi di Pulau Dewata sebagai yang tertinggi di Indonesia, di mana vaksin pertama telah mencapai angka 106 persen, vaksin kedua mencapai 97 persen, dan vaksin penguat atau booster

mencapai lebih dari 80 persen.

Koster menyebut, membaiknya kondisi pandemi COVID-19 dan tingginya vaksinasi menjadikan Bali sebagai destinasi yang kembali nyaman, aman dan kondusif. Ini ditandai dari meningkatnya kunjungan wisatawan terhitung sejak 1 Januari 2022.

“Sampai Jumat (2/9) jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai telah mencapai 5.123.974 orang, sedangkan jumlah wisatawan mancanegara telah mencapai 945.006 orang,” ujar Gubernur.

Berdasarkan rata-rata, dalam sehari kedatangan wisatawan domestik ke Bali mencapai lebih dari 12.000, dan wisatawan mancanegara lebih dari 10.000 orang.

Dalam rangka pemulihan

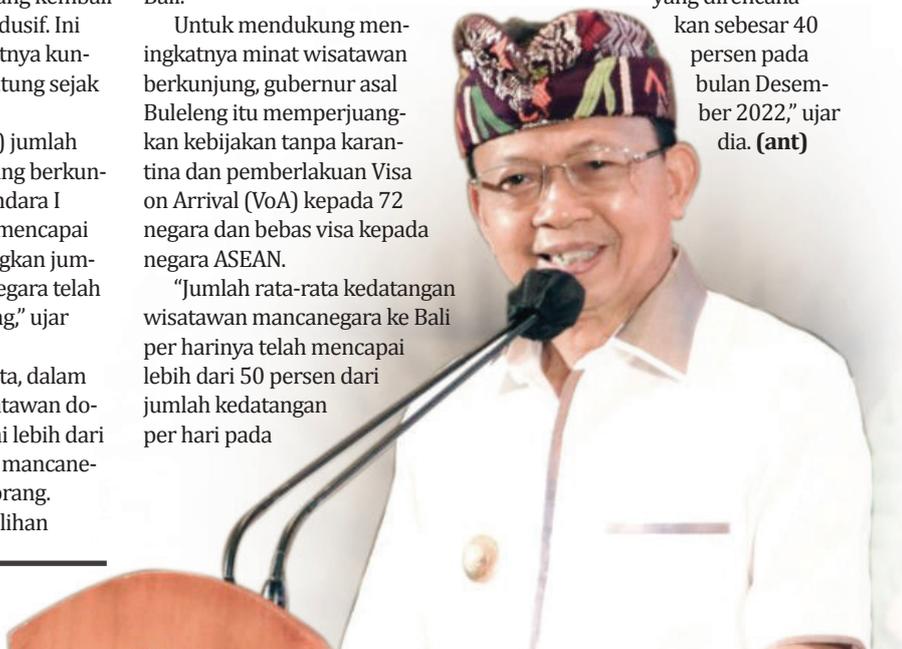
pariwisata Bali, Koster juga berani membuka penerbangan internasional, hingga kini tercatat 24 maskapai mendarat kembali di Bali.

Untuk mendukung meningkatnya minat wisatawan berkunjung, gubernur asal Buleleng itu memperjuangkan kebijakan tanpa karantina dan pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) kepada 72 negara dan bebas visa kepada negara ASEAN.

“Jumlah rata-rata kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali per harinya telah mencapai lebih dari 50 persen dari jumlah kedatangan per hari pada

situasi normal sebelum pandemi COVID-19, yang dicapai sejak akhir Juli 2022. Pencapaian ini jauh lebih cepat dan lebih tinggi dari target yang direncanakan sebesar 40

persen pada bulan Desember 2022,” ujar dia. **(ant)**



Gubernur Bali Wayan Koster saat memberi keterangan soal tren positif Bali pasca pandemi COVID-19 di Denpasar, Senin (5/9/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi Bali

Wagub Bali Ajak Masyarakat Manfaatkan Transportasi Publik Hadapi Kenaikan BBM



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Ardhana Sukawati di Denpasar, Senin (5/9/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Ardhana Sukawati mengajak masyarakat setempat dapat memanfaatkan fasilitas transportasi publik lebih maksimal dalam menghadapi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah ‘kan sudah membuat kebijakan dalam bentuk (subsidi bagi) mereka yang terdampak. Itu sebenarnya yang disaring (subsidi) yang tidak tepat sasaran,” kata Wagub Bali yang biasa disapa Cok Ace itu di Denpasar, Senin.

Selain itu, dalam menghadapi dampak kenaikan BBM, Cok Ace pun mengajak masyarakat untuk lebih bersabar dan melakukan langkah-langkah penghematan.

“Kita sabar saja, mari kita optimalkan apa yang kita miliki sekarang, yang biasanya kita di Bali kita lihat masih sering jalan-jalan mungkin hal-hal seperti kita hemat, (penggunaan) fasilitas oleh pemerintah yang disiapkan untuk transportasi publik, mari kita manfaatkan dengan maksimum,” ujarnya.

Pihaknya berharap, agar apa yang diharapkan pemerintah dari kebijakan menaikkan harga BBM ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Juga kita lihat negara-negara asing kesulitan juga fiskalnya, kita rasakan memang berat,” ucap pria yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Cok Ace menambahkan, Pemprov Bali saat ini be-

lum memiliki rencana untuk memberikan stimulus bantuan terhadap masyarakat karena kenaikan harga BBM ini.

Pemerintah menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9), jenis BBM yang dinaikkan harganya yakni Pertalite per liter menjadi Rp10.000, Pertamina menjadi Rp14.500, dan solar Rp6.800.

Terkait dampak kenaikan BBM bagi kunjungan wisatawan ke Bali, Cok Ace berpandangan akan berdampak, namun tidak signifikan

“Sementara belum kita lihat. Tetapi, yang jelas dampaknya pasti ke harga naik. Sebenarnya untuk di Bali konsumsi pariwisata masih rendah walaupun naik harganya, mungkin tidak akan dirasakan karena hotel-hotel belum full. Jadi, para wisatawan mungkin sedikit dampaknya kecuali untuk penerbangan,” ucapnya. **(ant)**

Pemkot Denpasar Sediakan Empat Mesin ADM Permudah Layanan ke Masyarakat

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, meluncurkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat yang membutuhkan layanan proses pencetakan data administrasi kependudukan (adminduk).

"Ini bermanfaat besar sekali bagi masyarakat, mempermudah semuanya karena penggunaannya sangat mudah. Di samping itu dapat meminimalisasi antrean," kata Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di Denpasar, Jumat.

Mesin ADM itu, lanjut dia, dapat memangkas proses birokrasi pembuatan surat-surat pencatatan sipil.

"Dengan hal itu, masyarakat bisa menghemat waktu banyak dan meminimalisasi potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan hingga korupsi," ujar Jaya Negara.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Ni Luh Lely Sriadi mengatakan di Denpasar sudah dipasang empat mesin ADM.



Empat mesin tersebut dipasang di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gedung Sewaka Dharma (GSD) Lumintang, Pasar Badung, Kantor Desa Padangsambian Kelod dan Kantor Desa Tegal Harum.

Lely menyampaikan, bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan di mesin ADM, sebelum melakukan cetak, mereka harus melakukan proses pendaftaran di website melalui aplikasi Taringdukcapil dengan memasukkan e-mail.

Setelah itu akan ada notifikasi berupa "username" dan "password". Selanjutnya, warga bisa melakukan proses pencetakan. Baik mencetak kartu keluarga maupun e-KTP dan



Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat menyaksikan masyarakat yang memanfaatkan layanan Mesin ADM di Kantor Desa Tegal Harum di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Kartu Identitas Anak (KIA).

"Prosesnya harus daftar dulu di aplikasi Taringdukcapil. Jadi mereka bisa mencetak sendiri di empat tempat ADM yang sudah disediakan," ucapnya.

Sementara itu Perbekel (kades) Desa Tegal Harum Komang Adi Widiantara mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Wali Kota Denpasar serta Bank BPD Bali atas segala dukungan kepada Desa Tegal Harum sehingga sekarang

memiliki mesin ADM untuk mempermudah masyarakat di dalam mengurus administrasi kependudukan.

"Dengan adanya mesin ini membuktikan komitmen Pemerintah Kota Denpasar maupun Pemerintah Desa Tegal Harum memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga mempermudah di dalam mengurus administrasi kependudukan," ujarnya. (ant)

Pemkot Denpasar Tingkatkan Kemampuan Pengelola Pondok Wisata



Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Dezire Mulyani mengalungkan tanda peserta pelatihan pengelola pondok wisata kepada perwakilan peserta di Denpasar, Rabu (7/9/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar

PEMERINTAH Kota Denpasar meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dari pengelola homestay atau pondok wisata di Ibu Kota Provinsi Bali itu agar lebih profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

"Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan diantaranya peserta mengetahui dan memahami karak-

teristik pelayanan pondok wisata," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Dezire Mulyani saat membuka pelatihan pengelola pondok wisata di Denpasar, Rabu.

Menurut Dezire, pengelolaan pondok wisata yang tepat menjadi faktor penting agar wisatawan dapat menikmati daya tarik wisata dalam waktu yang lebih lama serta menciptakan citra yang baik.

Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Kota Denpasar memandang perlu dilaksanakan pemberdayaan sumber daya pariwisata melalui kegiatan pelatihan bagi 40 pengelola pondok wisata, yang akan berlangsung selama dua hari, 7-8 September 2022.

"Melalui pelatihan ini, kami harapkan peserta dapat mengetahui dan memahami standar pondok wisata yang berlaku di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peserta dapat mengetahui dan memahami pengelolaan pondok wisata yang profesional," ujar Dezire.

Dalam kegiatan pelatihan yang bersumber dari dana APBN itu, disusun dalam bentuk modul/handout yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Sebanyak 40 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut juga akan diajak untuk berkunjung langsung ke pondok wisata di ka-

wasan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Hadir selaku narasumber pelatihan yakni Ida Bagus Purwa Sidemen dari unsur PHRI Bali, I Gusti Agung Bagus Mantra yang mewakili unsur praktisi, Ketut Swabawa dari unsur akademisi dan Agus Made Yoga Iswara dari IHGMA Provinsi Bali.

Salah satu peserta pelatihan, Putu Kusuma yang juga pengelola Kubu Daton Homestay asal Sanur mengapresiasi Dinas Pariwisata Kota Denpasar telah menggelar Pelatihan Pengelolaan Homestay/Pondok Wisata Kota Denpasar itu.

"Kegiatan ini dapat memacu peningkatan kompetensi bagi kami para pelaku pariwisata. Selain itu, kami mendapat ilmu baru cara memberikan pelayanan pada wisatawan. Semoga kegiatan semacam ini semakin banyak difasilitasi pemerintah bagi pengelola pondok wisata," kata Kusuma. (ant)

Pemkot Denpasar Gencarkan Belanja Produk Dalam Negeri

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) guna mengencarkan pembelian dan pemakaian produk-produk nasional dalam pengadaan barang di instansi pemerintah setempat.

"Saya harapkan seluruh pemangku kepentingan pada organisasi perangkat daerah mempunyai satu persamaan persepsi terhadap peraturan-peraturan P3DN," kata Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka sosialisasi tersebut di Denpasar, Kamis.

Dengan demikian, ujar dia, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dapat mencapai sasaran.

Saat membacakan sambutan Wali Kota Denpasar secara tertulis, Arya Wibawa menyampaikan Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk



Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam Inpres tersebut, pemerintah secara tegas menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, mulai dari Jaksa Agung, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI dan Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara.

Kemudian Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar dalam setiap pengadaan barang dan jasa dapat memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, guna meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

"P3DN merupakan salah satu upaya yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing produk industri dengan diimbangi standardisasi produk industri," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Ni Nyoman



Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Denpasar, Kamis (8/9/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Sri Utari mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri pengadaan barang di instansi pemerintah.

Selain itu, untuk memacu dunia usaha agar selalu meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta mutu produk guna meraih kepercayaan konsumen

dalam negeri.

Kemudian juga untuk mendorong tumbuhnya produk-produk baru dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan menjadi prioritas bagi belanja pemerintah. **(ant)**



Sejumlah warga Denpasar yang berolahraga saat uji coba Car Free Day di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (11/9/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, kembali membuka atau menggelar Car Free Day (CFD) di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon dan kawasan Taman Kota Lumintang, setelah sempat terhenti lebih dari dua tahun karena pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Ketut Sriawan di Denpasar, Minggu, mengatakan pelaksanaan Car Free Day ini digelar menyusul melandainya kasus COVID-19 di Denpasar, sehingga memungkinkan untuk

dilaksanakan kegiatan dengan mobilitas massa.

"Sekarang Denpasar sudah zona hijau dan ada beberapa wilayah yang masih zona kuning. Kami ingin uji coba dulu hari ini," ujar Sriawan.

Sriawan mengatakan di hari pertama pelaksanaan uji coba Car Free Day ini masyarakat cukup antusias memanfaatkan momen untuk berolahraga hingga bersepeda.

Setelah dilakukan uji coba ini, pihaknya akan membuka secara

Pemkot Denpasar Kembali Terapkan Car Free Day

resmi minggu depan. "Pelaksanaan CFD ini merupakan wahana bagi masyarakat berolahraga, sehingga tercipta warga Denpasar sehat. Selain juga bertujuan untuk mengurangi polusi udara," ujarnya.

Dalam pelaksanaan selanjutnya, Dinas Perhubungan Denpasar akan terus melakukan peninjauan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Hari ini petugas yang melakukan peninjauan di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon sebanyak 60 petugas dari Dinas Perhubungan, Kepolisian hingga petugas Linmas Desa Sumerta Kelod. Sementara untuk di Lumintang dikerahkan sebanyak 20 personel atau petugas.

"Seiring dengan melandainya

kasus dengan status Denpasar PPKM Level 1, serta untuk menghilangkan kejenuhan masyarakat, maka CFD yang merupakan program Pemkot Denpasar kembali dibuka," ucapnya.

Sriawan kembali mengimbau masyarakat yang datang ke CFD agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, salah seorang masyarakat yang mengikuti CFD, Wayan Agus Pratama menyambut gembira dibukanya kembali CFD ini.

"Saya sering olahraga ke sini pagi dan sore setiap hari. Dengan adanya Car Free Day ini suasananya jadi lebih meriah dan bisa lebih leluasa berolahraga tanpa was-was," ujarnya. **(ant)**

Pemkab Badung Ajak Pemuda Hindu Aktif Bangun Daerah

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengajak para pemuda Hindu yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB) Badung agar ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah.

“Para pemuda Hindu ini kami harap dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan program kami yaitu membangun Bali, membangun Badung sesuai kearifan lokal yang berbasiskan agama Hindu,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan tertulis yang diterima di Mangupura, Senin.

Sebelumnya, Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB) Badung telah menyelenggarakan pelantikan pengurus kedua periode 2022-2025 yang dirangkaikan Seminar Komunikasi Digital bertemakan “Peluang dan Tantangan Pemuda Badung”.

Sekda Adi Arnawa mengatakan menyambut baik atas dibentuknya dan dilantiknya pengurus APHB

Badung karena kemajuan Bali dan khususnya Badung sebagai daerah basis pariwisata di Bali dengan berbagai dinamika yang terjadi tentunya sangat berkaitan secara langsung terhadap keberadaan para generasi muda.

“Oleh karena itu kami berharap kepengurusan Aliansi Pemuda Hindu Bali Badung yang baru ini dilantik ini agar tetap dapat bersinergi dengan kami di pemerintah,” katanya.

Ketua Umum PP APHB Gde Wikan Pradnya Dana menjelaskan, APHB Badung itu diharapkan dapat menjadi wadah peran keaktifan pemuda Hindu untuk berbuat lebih banyak lagi khususnya bagi daerah Badung.

“APHB Badung harus siap bersinergi dengan pemerintah dan



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kedua kiri) saat menghadiri pelantikan Pengurus Kabupaten APHB Kabupaten Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

siapapun untuk dapat bersama-sama membangun SDM Hindu yang unggul, dari Badung untuk Pulau Dewata,” katanya

Sementara itu, Ketua PK APHB Badung Gede Andi Suryatama menambahkan, setelah pengurus APHB Badung dilantik, pihaknya akan segera bersinergi dengan pihak terkait yang berkaitan

dengan kegiatan-kegiatan agama, pendidikan, sosial, dan budaya.

“Kami segera raker untuk menentukan program dan setelah itu kami segera bergerak bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Kantor Kementerian Agama Badung, PHDI, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di wilayah Badung,” ujarnya. (adv)

Pemkab Badung Cegah Korupsi Sistem Kelola Pupuk Bersubsidi



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) saat Penyampaian Data dan Informasi terkait dengan pencegahan korupsi pada tata kelola pupuk bersubsidi. ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali berkomitmen melakukan upaya pencegahan korupsi pada tata kelola pupuk bersubsidi di wilayahnya.

“Kami juga telah menghadiri kegiatan penyampaian data dan informasi terkait dengan pencegahan korupsi pada tata kelola pupuk bersubsidi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan

untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di Badung agar selalu berada dalam regulasi,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, terkait dengan program distribusi pupuk bersubsidi, Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka menjamin ketersediaan pangan telah mel-

akukan berbagai upaya diantaranya pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran subsidi benih padi kepada petani.

“Sebelum pandemi COVID-19 kami juga sudah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk seiring dengan pulihnya kemampuan keuangan daerah dan kedepan akan dialokasikan anggaran untuk subsidi pupuk” katanya.

Bupati Giri Prasta mengungkapkan, pada sektor pertanian Pemkab Badung juga sudah menyiapkan program agar Badung nantinya bisa mandiri tanpa adanya subsidi dengan selalu berpedoman dengan program pemerintah pusat.

“Kami di Badung juga sudah menggunakan Aplikasi REKAN. Dengan pengembangan aplikasi Rekan ini kami yakin akan memudahkan petani memenuhi kebutuhan pupuknya sehingga diharapkan petani dapat meningkatkan produktivitas hasil tani guna

mendukung program ketahanan pangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Satuan Tugas Khusus Hotman Tambunan menjelaskan, pihaknya bersama Pemkab Badung telah mengkoordinasikan beberapa hal, diantaranya adalah terkait dengan pupuk bersubsidi dan terkait Aplikasi Rekan.

Saat ini, menurutnya Kabupaten Badung merupakan area percontohan dalam rangka penggunaan Aplikasi REKAN yang diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan tentang pupuk serta menjaga akuntabilitas pupuk subsidi.

“Sesuai dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi digunakan juga kartu tani dan dinilai banyak persoalan pada kartu tani ini sehingga diharapkan melalui Aplikasi Rekan ini permasalahan petani dapat diatasi,” ujarnya. (adv)

TPID-Satgas Pangan Badung Terus Pantau Harga Pangan Cegah Inflasi

TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Bali, bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan setempat, terus memantau harga pangan sebagai upaya mencegah inflasi.

"Ini kami lakukan sesuai dengan arahan pemerintah pusat kepada dinas terkait untuk segera bergerak cepat menyiapkan data dan agar terus memantau terkait dengan harga-harga pasokan pangan, bila perlu setiap minggu harus melaporkan perkembangan harga," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, pihaknya mengajak seluruh pihak terkait untuk bergerak meminimalkan kekurangan tingkat persediaan pangan Badung yang sesuai dengan interpelasi pemerintah untuk membuat Perumda Pangan, agar dapat membeli hasil produksi para petani setempat

guna membantu mereka untuk mendapatkan pendapatannya.

Pihaknya juga meminta kepada dinas terkait agar memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan bantuan sosial, dimana bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.

"Jangan sampai masyarakat yang berhak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan bantuan dan masyarakat yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan," katanya.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan, pihaknya memandang perlu adanya langkah cepat, terutama dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga BBM. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah pusat juga telah melaksanakan program bantuan sosial.

"Jika kami ingin menekan laju inflasi, bagaimana kami meningkatkan daya beli masyarakat dalam kondisi pendapatan masyarakat kurang adalah



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa saat memimpin rapat HLM TPID Kabupaten Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

dengan salah satu jalan yakni mencoba menyalurkan bantuan sosial," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung IB Gede Arjana menambahkan, pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi Bank Indonesia Bali yang selalu memberikan informasi perkembangan inflasi dan harga

barang dan mendukung pengendalian inflasi kepada TPID Kabupaten Badung.

"Kami berterima kasih kepada TPID Badung sudah melakukan koordinasi dengan baik dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipasi dalam merancang, melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi," ujarnya. (adv)

Pemkab Badung Tingkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, khususnya di wilayah desa, seperti dengan mendorong warga memanfaatkan lahan perkebunan untuk ditanami sayuran.

"Yang telah terlaksana adalah

program ketahanan pangan di Desa Dalung yang berkesinambungan. Desa Dalung sudah dapat berbagi berbagai hasil kebun seperti terong, tomat, timun dan juga hasil budi daya ikan lele. Ini juga merupakan bukti nyata dari pengelolaan dana desa yang

bijak dan tepat sasaran," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan, sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, pihaknya sangat apresiasi program yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dalung Badung.

Menurut Bupati Giri Prasta, kegiatan serupa diharapkan nantinya dapat terus ditingkatkan serta bisa dilaksanakan di wilayah desa-desa yang lain.

"Kami berharap apa yang dilaksanakan oleh kelompok ketahanan pangan Desa Dalung beserta segenap unsur yang terlibat dapat ditiru dan digiatkan di desa-desa yang lainnya dan semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Badung ini dapat tercapai," katanya.

Sementara Perbekel Dalung I

Gede Putu Arif Wiratyta mengungkapkan, pihaknya menyelenggarakan panen raya hasil kebun dan ikan ketahanan pangan yang merupakan panen yang keempat kalinya dalam program ketahanan pangan di desa itu.

"Dalam setiap panennya, hasil-hasil kebun yang dipanen kami bagikan kepada masyarakat secara sukarela," ungkapnya.

Dari lahan dengan luas tujuh are yang dikelola, ia menjelaskan bahwa Desa Dalung sudah bisa berbagi hasil kebun seperti tomat dan sayuran serta ikan yang dalam hal ini adalah ikan lele.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Badung yang sudah banyak membantu sehingga program kami di Desa Dalung dapat terealisasi terutama pada kegiatan ketahanan pangan hari ini," ujar Gede Putu Arif Wiratyta. (adv)

Pemkab Badung Minta Kepala Lingkungan Buat Program yang Sesuai Kebutuhan

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali meminta jajaran kepala lingkungan (kaling) untuk membuat program kegiatan dan pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Dengan adanya anggaran sampai di tingkat Kaling maka program kegiatan dan pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bisa segera dilaksanakan di wilayah masing-masing,” ujar Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat memberikan pengarahannya kepada Camat, Sekretaris Camat, Lurah dan perwakilan Kaling terkait penganggaran di Mangupura, Senin.

Dalam arahnya, ia meminta seluruh Camat bersama Lurah dan kepala lingkungan di Kabupaten Badung agar dapat melakukan koordinasi secara langsung dengan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung.

“Koordinasi tersebut dilakukan untuk segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di masing-masing wilayah, secara proporsional sehingga kepala lingkungan bisa mulai menyusun program di wilayahnya,” katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, diberikannya ruang kepada camat, lurah hingga ke kepala lingkungan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran merupakan wujud transfer wibawa Pemkab Badung kepada pelayan masyarakat tingkat terbawah yakni kepala lingkungan.

Menurutnya, dengan adanya ruang tersebut nantinya kepala lingkungan bisa lebih mengabdikan diri kepada masyarakat setempat. Meskipun begitu, pihaknya juga tidak memberikan tambahan kewenangan



Bupati Badung I Nyoman Nyoman Giri Prasta saat memberikan pengarahannya di Puspem Badung, Senin (12/9). ANTARA/HO-Pemkab Badung

kepada camat, lurah maupun kepala lingkungan.

“Namun kami memberikan tambahan program kegiatan dan program pemberdayaan di masing-masing wilayah, sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku,” ungkap Bupati Giri Prasta.

Dalam pengarahannya tersebut, Bupati Giri Prasta didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ida Ayu Istri Yanti Agustini, Kepala PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Made Surya Darma. (adv)

Pemkab Badung Bertekad Wujudkan Pembangunan Utilitas Terpadu



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat membahas tindak lanjut investasi utilitas terpadu atau ducting di ruang pertemuan Rumah Jabatan Bupati Badung, Selasa (13/9/2022). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali berkomitmen mewujudkan program pembangunan utilitas terpadu bawah tanah guna menjaga keindahan dan estetika wilayah.

Sebelumnya, program modernisasi ke bawah itu sudah diwujudkan dengan pembangunan utilitas

terpadu di kawasan pariwisata Kuta dan Seminyak.

“Kami memiliki program dalam menjaga estetika, keasrian dan keindahan. Maka kami melakukan modernisasi ke bawah. Ke depan utilitas terpadu menjadi prioritas utama di seluruh Badung, namun urgensi saat ini di kawasan pari-

wisata Kuta,” ujar Bupati I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Selasa.

Ia didampingi Kadis PUPR IB Surya Suamba juga telah menerima investor dalam rangka menindaklanjuti investasi utilitas terpadu atau ducting.

Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta menyambut baik kehadiran investor yang ingin bekerja sama dalam upaya meningkatkan pembangunan di Badung.

Menurutnya, pengembangan utilitas terpadu tersebut sudah terlaksana namun sebatas di kawasan Jalan Poppies 1, Poppies 2 Kuta dan Seminyak menuju Basangkasa.

“Hal ini sebagai upaya penataan kabel yang masih menggantung dan melintang, termasuk jaringan listrik maupun PDAM,” katanya.

Ia menjelaskan saat ini wilayah yang mendesak dibangun utilitas terpadu adalah kawasan pariwisata Kuta, namun ke depan seluruh

wilayah Badung diharapkan dapat memiliki utilitas terpadu bawah tanah.

“Semua wilayah Badung menjadi prioritas utama, namun saat ini emergensinya di kawasan Kuta,” ungkap Bupati Giri Prasta.

Presiden Direktur PT Inti Bangun Sejahtera yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi Andre Tjioe mengungkapkan, pihaknya ingin bekerja sama dengan Pemkab Badung dengan membangun utilitas terpadu.

Hal itu didasari karena saat ini masih banyak kabel yang menggantung di udara yang dapat diturunkan ke bawah tanah di infrastruktur utilitas terpadu.

“Kalau diberi kesempatan kami yang bangun semua dan semua fiber optik diturunkan ke bawah. Program ini kalau disetujui kami akan kebut mulai tahun 2023. Kami butuh waktu 8-10 bulan menyelesaikan proyek ini,” ujarnya. (adv)

Badung Tingkatkan Kesadaran Warga untuk Vaksinasi COVID-19 Penguat

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali menyelenggarakan konsolidasi dan monitoring vaksinasi COVID-19 dosis penguat di wilayah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi itu.

“Dalam situasi saat ini kami tidak boleh lengah akan bahaya COVID-19 yang masih mengancam bukan hanya untuk masalah kesehatan, namun agar ke depannya tidak ada risiko tinggi penyebaran pandemi yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat saat ini yang sudah mulai pulih dan bangkit,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Desa Gulingan, Mengwi, Badung, Selasa.

Ia mengatakan untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga, perlu sinergi dan koordinasi dalam kegiatan secara sistematis, dengan turun langsung ke lapangan agar mendapatkan data-data warga

untuk divaksin.

“Hambatan yang saat ini ditemukan yaitu terkait sinkronisasi data, sosialisasi teknis, dampak vaksin, serta jenis vaksin yang tepat untuk diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Wabup Ketut Suiasa menambahkan dalam konsolidasi dan monitoring, tokoh-tokoh masyarakat juga memberikan pembekalan dan pemahaman kepada warga terkait dengan vaksinasi COVID-19

“Ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, meningkatkan rasa percaya masyarakat sehingga pencapaian pelayanan vaksin penguat ini bisa mencapai target di atas 80 persen,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Badung Made Padma Pus-pita menjelaskan target vaksinasi COVID-19 penguat di Badung harus mencapai 80 persen.



Vaksinasi COVID-19 penguat di Badung. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

Sebelum melakukan pengecekan dan pemantauan langsung ke lapangan, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan masyarakat sampai tingkat banjar.

“Apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tokoh masyarakat, bahwa kami sebelum turun akan melakukan strategi, contoh di salah satu desa dengan jumlah banjar yang ada di sana

akan kami fokuskan memberi vaksinasi sampai tuntas bila perlu sampai 100 persen,” ungkapnya.

Pihaknya juga melakukan pendataan sebelum turun ke lapangan dengan berkoordinasi bersama tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 lebih efektif dan efisien. (adv)

Dinas Kebakaran Badung Jamin Nihil Kebakaran saat KTT G20



Apel gelar pasukan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dalam rangka kesiapan menyambut KTT G20. ANTARA/HO-Pemkab Badung

DINAS Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) Kabupaten Badung, Bali menjamin nihil insiden kebakaran saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan November mendatang.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan pasukan, dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Badung bersama jajaran dan seluruh pasukannya sudah menunjukkan bukti kesiapan untuk menyambut kegiatan internasional ini dengan nihil insiden,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa saat apel gelar pasukan Diskarmat jelang KTT G20 di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya

meminta Diskarmat Badung untuk terus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menjawab kepercayaan dan kehormatan Badung sebagai tuan rumah KTT G20.

Untuk itu, Sekda Adi Arnawa juga telah meminta Diskarmat Badung untuk segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badung dalam rangka mendorong beberapa hal penting yang bisa dianggarkan pada anggaran perubahan APBD 2022.

“Ini merupakan langkah yang sangat serius dan penting untuk didukung guna kesiapan pasukan kami dalam rangka menghadapi event besar ini, baik segi sarana, prasarana maupun dari SDM-nya guna menghadapi KTT G20,” katanya.

Dengan kesiapan pasukan yang ada, Pemkab Badung juga mendukung dan mendorong secara intensifikasi dari segi peningkatan SDM, dari segi pelatihan yang

sangat penting dalam menghadapi bencana kebakaran yang terjadi.

“Kami tidak bisa mengandalkan dari segi fisik saja tanpa didukung SDM yang kuat, oleh karena itu saya akan mendorong hal seperti ini, saya perintahkan kepada Diskarmat Badung untuk melakukan koordinasi, dari segi sarana, prasarana yang bisa dipenuhi dan diperlukan,” ungkap Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung I Wayan Wirya menambahkan, pihaknya memastikan para petugas kebakaran di Badung mengedepankan profesionalisme, secara modern, terlatih dari segi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat.

“Kami siap dan akan terus membangun solidaritas, meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka kesiapan menyambut KTT G20,” ujarnya. (adv)

Bupati: KTT G20 Akan Berdampak Positif Sektor Pariwisata di Badung

BUPATI Badung, Provinsi Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Badung pada bulan November mendatang akan berdampak positif bagi sektor pariwisata di wilayah itu.

"Kegiatan KTT G20 memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi di Badung khususnya dan Bali pada umumnya, ini terbukti dengan terpenuhinya target pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Badung dari sektor pariwisata," katanya di Mangupura, Rabu.

Ia yakin suksesnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Badung pada bulan November 2022 akan memberikan dampak yang positif bagi citra Badung, Bali dan Indonesia di dunia Internasional.

Untuk menyambut kepala negara dan delegasi, kata dia, saat ini berbagai persiapan dan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana terus dilakukan di berbagai titik di Badung.

"Kami juga sudah sangat siap menyambut kunjungan para delegasi dari setiap negara peserta, melalui penataan infrastruktur pariwisata di wilayah Pantai Samigita atau Seminyak, Legian dan Kuta," katanya.

Selain berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, Bupati juga menyatakan bahwa pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua juga bisa menjadi momentum untuk merajut kebersamaan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.

"Badung merupakan kabupaten yang sangat aman dan kondusif karena pemerintah bersama masyarakat setempat konsisten menerapkan Pancasila



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) menerima silaturahmi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung, Rabu (14/9). ANTARA/HO-Pemkab Badung

terutama Sila kelima dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama," katanya.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan KTT G20 khususnya terkait koordinasi bidang pengamanan, Bupati I Nyoman Giri Prasta juga telah menerima silaturahmi perwakilan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Rumah Jabatan Bupati,

Puspem Badung.

Pada kesempatan itu, bupati menyampaikan komitmennya untuk selalu tegak lurus dengan arahan Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan KTT G20 di Bali serta mendukung penuh tugas pokok Paspampres dalam ajang pertemuan global tersebut. (adv)

Pemkab Badung susun strategi optimalkan penggunaan produk dalam negeri



Sekda Wayan Adi Arnawa (tengah) memimpin rapat tim terkait dengan P3DN. ANTARA/HO-Pemkab Badung

TIM Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Badung, Bali menyusun kajian yang strategis, cepat dan terukur untuk mengoptimalkan dan memperbanyak penggunaan produk dalam negeri khususnya di lingkungan pemerintah.

"Langkah-langkah ini ke depan-

nya akan mampu meningkatkan nilai produksi dalam negeri, serta mengurangi barang-barang impor, sehingga kita menjadi tuan di rumah sendiri," ujar Sekretaris Daerah Badung sekaligus Ketua P3DN Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah pusat mengoptimalkan dan memperbanyak penggunaan produk dalam negeri khususnya di lingkungan pemerintah.

"Oleh karena itu kami berharap semua pimpinan perangkat daerah, sekretaris dan PPK wajib mengetahui dari perencanaan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri lewat e-Katalog lokal," katanya.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan, P3DN memiliki tugas untuk yakni melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Swasta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

"Kami juga melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan P3DN dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkab Badung dan BUMD," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung Putu Eka Merthawan selaku Ketua Harian Tim P3DN Badung menambahkan, pihaknya juga bertugas memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara penyedia barang/jasa dan tim pengadaan barang/jasa.

Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pihaknya juga melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung dan BUMD.

"Kami juga melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan P3DN untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin dan menyampaikan laporan secara periodik hasil pelaksanaan P3DN," ujar Eka Merthawan. (adv)

Pemkab Tabanan Sabet "Universal Health Coverage (UHC) 2022"

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan, Bali menyabet penghargaan "Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022" yang merupakan penghargaan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Humas Pemkab Tabanan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, melaporkan penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Deputy Direksi BPJS wilayah Bali, NTT dan NTB Yudi Bastia di Kantor Bupati Tabanan, Kamis (1/9).

Setelah menyerahkan penghargaan itu kepada Bupati Tabanan Gede Sanjaya, Deputy Direksi BPJS wilayah Bali, NTT dan NTB Yudi Bastia mengatakan pemerintah pusat dan daerah sedang berupaya untuk dapat segera memulihkan kondisi perekonomian dalam situasi pandemi.

"Program JKN merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi yang berfungsi sebagai jaring pengaman nasional. Dengan masyarakat yang memiliki JKN,

maka akan lebih terlindungi, sehingga dapat lebih produktif dalam meningkatkan sektor perekonomian di daerah," kata Yudi.

Menurutnya, capaian UHC ini merupakan wujud nyata Pemkab Tabanan untuk memastikan kesehatan masyarakat di Tabanan. "Kami harapkan dukungan Pemkab Tabanan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS di wilayah Kabupaten Tabanan agar penduduk di wilayah Kabupaten Tabanan terlindungi jaminan kesehatannya," katanya.

Sementara itu, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya mengatakan program jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun 2022 merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Tabanan di sektor kesehatan dan jaminan sosial yang patut disyukuri.

"Hal itu berarti, Pemkab Tabanan telah memberikan jaminan kesehatan hampir kepada seluruh masyarakat, karena manfaat dari



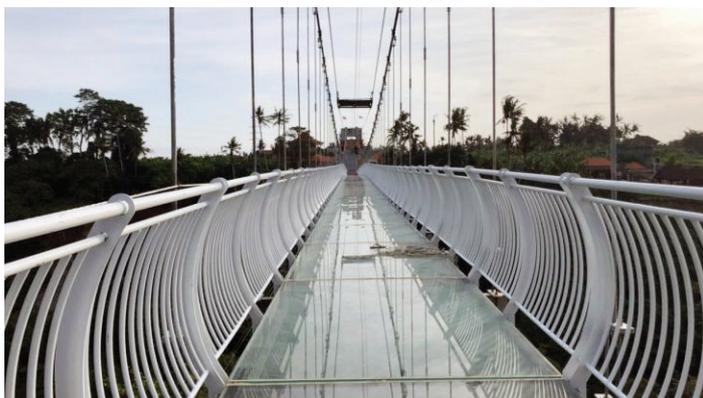
Pemkab Tabanan menyabet penghargaan "Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022" yang merupakan penghargaan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN). Penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Deputy Direksi BPJS wilayah Bali, NTT dan NTB Yudi Bastia di Kantor Bupati Tabanan (1/9). (Antara News Bali/HO-Pemkab Tabanan/Pande Yudha/2022)

UHC adalah masyarakat sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan pada hari pertama terdaftar sebagai peserta, tanpa harus menunggu 14 hari lagi, sehingga sangat membantu," ujarnya.

Menurut Bupati Tabanan Gede Sanjaya, suatu prestasi tidak hadir dengan kebetulan, namun sudah

tentu berkat kerja keras dari seluruh jajaran. Dia mengapresiasi jajaran OPD dan semua pihak terkait, juga pihaknya menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas kerjasama yang baik, dengan bersama-sama menjaga kesehatan masyarakat Tabanan. (ant)

Objek Wisata Jembatan Kaca di Gianyar Segera Rampung



Objek wisata jembatan kaca di Gianyar, Bali, yang akan menghubungkan Kecamatan Sukawati dan Blahbatuah, Kamis (1/9/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

PROGRES pembangunan objek wisata jembatan kaca di Kabupaten Gianyar, Bali, saat ini telah mencapai 90 persen dan segera rampung, sehingga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan berkunjung ke wilayah tersebut.

"Jembatan kaca menyambungkan dua desa dinas dan dua kecamatan, yaitu Blahbatuh dan Sukawati.

Kalau sekarang sudah 90 persen jadi dan saat ini sedang penataan," kata Perbekel Desa Saba Ketut Redana di Gianyar, Bali, Kamis.

Jembatan kaca yang menghubungkan pengguna dari Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati dengan Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh ini akan menjadi satu

lagi daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar.

"Menambah objek wisata di Desa Saba, yang sebelumnya sudah ada waterfall (air terjun), Oleh-oleh Krisna, penangkaran penyu, penglukatan Siwa Budha, dan Pantai Saba yang tidak kalah menariknya," ujar Perbekel.

Jembatan yang digarap oleh PT Kaishi dari China dengan memanfaatkan lahan dari desa ini nantinya akan berukuran panjang total 190 meter dengan tinggi 40 meter.

Redana menyebut kekuatan dari jembatan tersebut akan diuji nantinya dengan air seberat 10 ton untuk membuktikan kekuatan setara 250 orang berlalu lalang.

"Alas dan dinding jembatan dari kaca. Nanti, ketika berjalan alasnya akan muncul seperti efek retak, tapi untuk saat ini alat dan teknologinya belum terpasang," kata dia.

Berdasarkan perjanjian dari

pemrakarsa, nantinya ketika objek tersebut rampung, maka sebanyak 60 persen dari jumlah total pegawai akan diambil dari warga lokal, dengan pembagian 30 persen bagi Blangsinga dan 30 lainnya untuk Tegenungan.

Sementara 40 persen sisanya adalah tenaga menengah ke atas yang diambil dari negara pembuat.

Redana menuturkan bahwa berdasarkan sosialisasi dari Kaishi, proyek ini akan selesai pada September 2022 atau setelah dua tahun pengerjaannya.

Jembatan kaca yang diberi nama The Glass Bridge itu akan diselesaikan secara bertahap, mulai dari objek utamanya yaitu fisik jembatannya.

Hingga kini belum dapat dipas-tikan harga tiket untuk melintasi jembatan kaca itu, namun diyakini akan membantu peningkatan PAD desa ketika wisatawan nantinya datang. (ant)

Kominfo Canangkan Kabupaten Klungkung Masuk 50 "Smart City"

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencanangkan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu dari 50 kabupaten/kota yang masuk dalam program "Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City)" tahun 2022 yang diprogramkan pada Januari 2022.

"Untuk menyusun rencana induk smart city, kami telah menerima pendampingan dan kunjungan dari tim ahli Kemkominfo melalui bimbingan teknis yang digelar pada 23-24 Juni 2022," kata Bupati Kabupaten Klungkung I Nyoman Suwirta dalam keterangan yang diterima di Klungkung, Rabu.

Ia menyatakan usaha mewujudkan Klungkung sebagai kota pintar merupakan sebuah langkah nyata bagi Pemkab Klungkung untuk mewujudkan harapan menjadi kota yang cerdas dalam melayani masyarakat, meningkatkan potensi daerah dan memecahkan tiap masalah yang dihadapi berbasis teknologi.

"Pemerintah Kabupaten Klungkung intinya tidak menutup mata terhadap andil dan dukungan berbagai pihak dalam usaha mengembangkan Klungkung sebagai smart city melalui kerja sama berbagai pihak untuk pengembangan inovasi kerja perangkat-perangkat daerah yang ada di Kabupaten Klungkung," katanya.

Saat menghadiri penandatanganan komitmen bersama Gerakan Menuju Klungkung Smart City di Kantor Bupati Klungkung (6/9), Bupati Klungkung menyatakan penandatanganan komitmen tersebut menjadi bentuk komitmen seluruh perangkat daerah Kabupaten Klungkung dalam mengimplementasikan master plan smart city, yang telah disusun saat bimbingan teknis yang dilaksanakan selama empat tahap sejak bulan Juni 2022.

Oleh karena itu, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menandatangani komitmen bersama gerakan menuju Klungkung jadi kota pintar di Klungkung, Bali, Selasa (6/9/2022). ANTARA/Ho-Humas Pemkab Klungkung

Kominfo dan seluruh perangkat daerah yang telah menyusun master plan smart city tersebut dengan baik dan berharap rencana besar tersebut dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.

"Mari kita bekerja sama untuk wujudkan mimpi besar

kita menjadikan Klungkung sebagai smart city. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan, potensi-potensi yang kita miliki harus dengan pintar kita ekspos beriringan dengan smart city ini," kata Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. (ant)



Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menandatangani komitmen bersama untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. (HO Humas Pemkab Bangli)

PEMERINTAH Kabupaten Bangli di Provinsi Bali berembuk untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badan-

nya menjadi tengkes.

"Prevalensi balita stunting berdasarkan SSGI 2021 Kabupaten Bangli di persentase 11,8 persen. Tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi," kata Wakil Bupati Bangli I Wayan

Pemkab Bangli Berembuk Percepat Penurunan Stunting

Diar saat memimpin rapat mengenai percepatan penurunan stunting di Bangli, Rabu.

"Kita perlu segera kita atasi bersama. Baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, individu, komunitas maupun swasta, harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penanganan stunting," kata Wakil Bupati selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bangli.

Dalam rembuk percepatan penanganan stunting yang dihadiri oleh perwakilan BKKBN Provinsi Bali, pemimpin organisasi perangkat daerah, anggota TPPS, serta para camat di Kabu-

paten Bangli, Diar memaparkan bahwa percepatan penanganan stunting membutuhkan komitmen pemerintah hingga di tingkat desa, perubahan perilaku, dan pemberdayaan masyarakat.

Dia juga mengemukakan pentingnya dukungan penganggaran serta intervensi perbaikan gizi dan akses sanitasi dalam upaya penurunan stunting.

Para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Bangli telah menandatangani komitmen bersama untuk mendukung percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan di desa dan kelurahan lokus penanganan stunting. (ant)

Sekda Buleleng Minta UMKM Terdaftar Dalam e-Katalog Lokal

SEKRETARIS Daerah Buleleng, Bali, Gede Suyasa mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk terdaftar dalam e-katalog lokal.

“Saya mendorong hal tersebut sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19,” katanya saat menghadiri “Business Mentoring” yang digelar Hipmi Buleleng di Kantor Bupati Buleleng, Jumat.

Ia mengatakan digitalisasi memang harus dilakukan untuk dapat bertahan di dunia usaha, apalagi diperkuat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Suyasa mencontohkan e-

purchasing melalui sistem katalog elektronik. Terlebih saat ini, masing-masing daerah didorong untuk membuat e-katalog lokal untuk mengakomodasi keberadaan UMKM.

“Jadi bisa masuk ke dalam jaringan dan pengadaan, kita bisa memilih UMKM yang ada di daerah. Peluang ini harusnya ditangkap pengusaha-pengusaha muda lewat Hipmi yang sekarang ada kegiatan mentoring,” terangnya.

Pemerintah daerah terus menyiapkan etalase, terutama untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang bisa diambil UMKM lokal. Namun perlu inisiatif dari UMKM itu sendiri untuk mendaftar pada e-katalog.

“Tugas pemerintah membukakan peluang. Itu etalasanya akan terus bertambah sampai seluruh pengadaan yang bisa digarap oleh UMKM dapat tertampung di e-katalog,” katanya.



Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Bali, Gede Suyasa, menghadiri “Business Mentoring” yang digelar HIPMI Buleleng di Kantor Bupati Buleleng, Jumat (2/9/2022). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Buleleng/Bgs/2022)

Sementara itu, Ketua Hipmi Buleleng Gede Subianta Eka Kresnawan mengatakan pihaknya memberikan pelatihan secara intensif selama tiga bulan dalam 12 kali pertemuan dengan beragam topik dan mentor, sehingga 13 orang peserta yang berasal dari Buleleng dan Karangasem mendapatkan ilmu dan pengalaman yang

berkelanjutan dari segala sisi bisnis.

“HIPMI business mentoring” ini merupakan program untuk para pelaku usaha pemula agar mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berkelanjutan dari segala sisi bisnis, mulai dari digital marketing, fundamental bisnis, perencanaan bisnis, hingga branding dan membangun tim. **(ant)**

Dinas Perikanan Jembrana: Tidak Wajib Bongkar Ikan di TPI



Aktivitas pembongkaran ikan nelayan di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi/2022)

KEPALA Dinas Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan Jembrana Ketut Wardanaya menyatakan pihaknya tidak mewajibkan perahu untuk bongkar ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di dalam Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.

“Itu bukan mewajibkan apalagi

ada ancaman. Kami hanya menyarankan nelayan menurunkan dan menimbang ikan di TPI. Mau atau tidak, itu terserah nelayan,” katanya di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi keberatan nelayan Jembrana jika harus membongkar

ikan di TPI di dalam PPN Pengambengan.

“Kalau diwajibkan disana kami keberatan, karena saat tangkapan ikan melimpah perahu harus antri bongkar yang berpotensi menurunkan kualitas ikan,” kata salah seorang nelayan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara.

Nelayan itu mengatakan, TPI di PPN Pengambengan belum mampu menampung seluruh perahu untuk bongkar ikan, sehingga kebijakan dari Pemkab Jembrana tersebut belum tepat.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan Jembrana Ketut Wardanaya, pihaknya hanya ingin menertibkan lokasi pembongkaran ikan, karena saat menurunkan di TPI ada retribusi yang diterima Pemkab Jembrana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini ada beberapa lokasi pembongkaran ikan perahu selerek yaitu di pelabuhan, muara

dan belakang pabrik.

Untuk di pelabuhan dan pabrik, katanya, ada retribusi yang diterima Pemkab Jembrana, sedangkan di muara karena lokasinya milik pribadi, pihaknya kesulitan untuk mendapatkan retribusi.

“Yang bongkar langsung di pabrik, pihak pabrik yang menyetorkan retribusi dan ada orang kami disana mendata berapa ikan yang turun. Untuk yang di muara kami masih kesulitan,” katanya.

Saat ini, pihaknya masih menyusun teknis pembongkaran ikan di muara agar Pemkab bisa mendapatkan PAD dari lokasi tersebut.

“Jalan tengahnya, lokasi itu tetap dikelola pemilik, tapi akan dikenakan pajak 15 persen sesuai aturan. Kami akan pantau dan data berapa volume ikan yang turun di muara, sehingga bisa menentukan berapa pajak yang harus disetor pengelola disana,” katanya. **(ant)**

Bupati Karangasem Ajak ASN Bersepeda ke Kantor

BUPATI Karangasem, Bali, Gede Dana mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kabupaten Karangasem untuk menggunakan sepeda saat pergi dan pulang kantor setiap hari Jumat.

“Sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara, disiplin dan semangat kerja itu penting,” kata Gede Dana di Karangasem, Jumat.

Dengan bersepeda ke tempat kerja, menurutnya, bermanfaat untuk menghilangkan stres, mengurangi polusi, dan menjadi kebiasaan positif dalam menjaga kebugaran. Ini merupakan upaya tepat dan paling sederhana yang bisa dilakukan seluruh ASN dalam berperilaku sehat.

Untuk meningkatkan minat ASN, Bupati Gede Dana pun mencontohkannya dengan bersepeda pada Jumat pagi menuju ke kantornya.

“Bersepeda pagi itu asyik, olahraga sekaligus berkeliling menghir-

up udara pagi. Tadi berangkat jam 5.30 WITA dari rumah, sekalian mampir ke sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) mengecek kegiatan krida Jumat pagi ASN di sana,” kata dia.

Dengan sepeda miliknya, Gede Dana mengayuh dari wilayah Padang Kerta hingga Kota Amplapura sembari memantau aktivitas warga dan berkunjung ke kantor-kantor pemerintahan di lingkup Pemkab Karangasem.

Kehadirannya sekaligus untuk berdialog dengan Kepala OPD dan para ASN sekaligus mengajak mereka bersepeda ke kantor, khususnya pada hari Jumat.

Ia menuturkan bahwa apabila rencananya ini diterapkan maka akan bermanfaat besar. Selain untuk meningkatkan kekuatan otot, bersepeda juga dapat melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh.

“Bersepeda juga bisa membantu mengontrol berat badan



Bupati Karangasem, Bali, Gede Dana mengajak para ASN di OPD lingkup Karangasem untuk menggunakan sepeda saat bekerja di hari Jumat, Karangasem, Jumat (2/9/2022). ANTARA/HO-Pemkab Karangasem

agar tetap ideal, karena bersepeda membantu membakar kalori serta meningkatkan metabolisme. Membantu menjaga kesehatan jantung, karena bersepeda termasuk ke dalam jenis olahraga kardio yang berfungsi menjaga kesehatan jantung, paru-paru, serta sirkulasi darah,” ujar Gede Dana.

Bupati Karangasem tersebut juga meyakini apabila para ASN rutin bersepeda maka dapat mengurangi resiko depresi, ketika mengeluarkan hormon dopamin yang memicu rasa bahagia, maka perasaan stres dan gangguan kecemasan lainnya akan turut berkurang. **(ant)**

BI Bali Bagikan 77.000 Bibit Cabai Untuk Pengendalian Inflasi



Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari saat menyerahkan bantuan bibit cabai kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster di Denpasar, Jumat (2/9/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali membagikan sebanyak 77 ribu bibit cabai secara simbolis dalam rangkaian kegiatan Pasar Rakyat di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

(GNPIP) di Pulau Dewata.

“Presiden telah menginstruksikan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan. Untuk ini, BI dan pemerintah daerah menginisiasi GNPIP, yang salah satunya mendorong gerakan urban farming,” kata Deputi Kepala

Perwakilan BI Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari di Denpasar, Jumat.

Diah Utari dalam acara Pasar Rakyat tersebut menyerahkan bantuan secara simbolis bantuan bibit cabai kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster.

Selanjutnya Tim Penggerak PKK Provinsi Bali menyerahkan bibit cabai kepada Ketua Tim Penggerak PKK di masing-masing kabupaten/kota.

Menurut dia, sengaja diberikan bantuan bibit cabai karena inflasi di Ibu Kota Provinsi Bali cukup tinggi, yakni pada Juli 2022 tercatat sebesar 6,72 persen.

“Sumber utama penyumbang inflasi di sini yakni bahan pangan hortikultura seperti cabai dan bawang merah,” ujar Diah Utari.

Tak hanya dialokasikan sebagian untuk Tim Penggerak PKK hingga tingkat terbawah, juga nantinya dilakukan gerakan penanaman bibit cabai ke beberapa klaster.

“Kami bekerja sama dengan PKK karena PKK sudah punya struktur organisasi yang jelas hingga tingkat terbawah, sehingga bisa mudah dimonitor,” ucapnya didampingi Deputi Direktur KPwBI Provinsi Bali Donny H Heatubun itu.

Setelah pemberian bantuan bibit cabai, pihaknya mengharapkan gerakan ini tidak berhenti hingga proses menanam saja, tetapi pada Desember nanti bisa dipanen.

Diah Utari dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi kegiatan Pasar Rakyat yang digagas Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dan kabupaten/kota itu.

“Ini kegiatan bagus dengan konsep belanja dan berbagi. Apalagi sekarang kondisi ekonomi setelah pandemi COVID-19 belum pulih sepenuhnya. Dengan demikian, kegiatan yang mendorong UMKM untuk bisa berkumpul dan belanja ini bisa membantu membangkitkan perekonomian Bali,” ujarnya. **(ant)**

PLN Dukung Penggunaan Energi Bersih di Kawasan KTT G20

PERSEROAN Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) mendukung penggunaan listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Badung, Bali, yang bakal menjadi lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.

Oleh karena itu, PLN pun menyerahkan 200 unit sertifikat energi baru dan terbarukan (EBT) kepada The Apurva Kempinski Bali demi mendukung penggunaan energi bersih atau energi rendah emisi di lokasi pertemuan puncak G20 itu.

General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Bali I Wayan Udayana, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar, Selasa, mengatakan bahwa The Apurva Kempinski Bali merupakan hotel pioneer, yang pertama di Bali yang memanfaatkan REC.

"Tentu ini menjadi bukti bahwa

pelaku pariwisata dapat turut ambil bagian memberi contoh untuk meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim, dan kami berharap ini dapat memicu pelaku pariwisata lainnya untuk mengambil langkah yang sama," katanya.

Ia menambahkan bahwa The Apurva Kempinski Bali juga jadi lokasi (venue) G20 pertama yang memanfaatkan REC. Dengan demikian, pasokan listrik di lokasi KTT G20 dapat dipastikan bersumber dari energi baru dan terbarukan, salah satunya dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang yang kapasitasnya mencapai 140 megawatt.

"Sertifikat yang diserahkan pada hari ini sejumlah 200 unit dan setara dengan 200 megawatt-hour yang berlaku sejak 1 Agustus 2022, sedangkan pemakaian hotel sendiri saat ini di atas 20.000. Artinya, masih ada potensi yang REC bisa dikerjasamakan," kata Udayana.

Dalam siaran tertulis yang



PT PLN UID Bali saat menerima penghargaan atas keberhasilan dalam memperkuat branding dan produk di Denpasar, Kamis (11/8/2022). ANTARA/HO-PT PLN

sama, Deputy GM Finance The Apurva Kempinski Bali Lisen Pribadi berharap pembelian REC itu menunjukkan komitmen perusahaan mendukung transisi menuju energi bersih di Indonesia.

"Kami berharap melalui pembelian (REC) ini dapat memberi kontribusi nyata untuk men-

dong transisi energi sekaligus menjadi contoh bagi hotel-hotel lainnya di Bali," ujarnya.

PLN per Agustus 2022 mencatat pihaknya menyediakan REC yang setara 4.243 megawatt-hour. Itu dimanfaatkan oleh 15 pelanggan dari kelompok industri dan bisnis. **(ant)**

Undiksha Singaraja Bangun Gedung Kuliah Baru di Denpasar



Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, mencanangkan pembangunan gedung kuliah baru di kampus Denpasar. (ANTARA/HO-Humas Undiksha/bgs/2022)

UNIVERSITAS Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja Kabupaten Buleleng, Bali, membangun gedung kuliah baru di Denpasar untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa.

"Kami bukan semata meningkatkan sarana prasarana (sarpras) pembelajaran di Kampus Singaraja saja, tetapi unit di Kota

Denpasar juga perlu mendapatkan dukungan penuh," kata Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel melalui siaran pers yang diterima di Buleleng, Sabtu.

Ia menegaskan anggaran pembangunan gedung kuliah ini murni menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU)

Undiksha sebesar Rp17 miliar.

"Pembangunan gedung kuliah di Denpasar ini murni menggunakan PNBP BLU Undiksha, yang mana pada tahun ini kita mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk penerimaan mahasiswa baru terpenuhi," ungkapnya.

Menurut dia, peningkatan sarana prasarana ini dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembelajaran yang semakin nyaman, aman dan representatif. Pembangunan direncanakan hingga tuntas, termasuk untuk fasilitas di dalamnya.

"Kami ingin gedung kuliah yang baru ini memenuhi syarat sebagai ruang kuliah," tegasnya.

Sesuai kontrak, pembangunan gedung tiga lantai ini tuntas pada Desember 2022, karena itu pelaksana proyek diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

"Seperti yang sudah disampaikan, Januari sudah kita gunakan.

Kita berharap tidak molor. Jika sampai molor akan kita 'black list' nanti pemenang pembangunan ini karena dia sudah janji bisa menyelesaikan sesuai kontrak yang disepakati," tegasnya.

Sementara itu, Konsultan Perencana Pembangunan, Ari Setia Wibawa menjelaskan pada gedung ini nantinya terdapat 19 ruang kuliah dengan desain yang fleksibel dan dilengkapi dengan ruang dosen, ruang sidang dan perpustakaan.

Selain itu, bangunan ini juga mengadopsi konsep kampus hijau, yaitu ramah lingkungan dan hemat energi.

"Undiksha yang mengadopsi sebagai kampus hijau mendasari seluruh pembangunannya kepada rancangan yang hijau, yaitu hemat energi, gedung yang memperhatikan lingkungannya dari sisi air, limbah dan energi yang ada di dalamnya, sehingga gedung ini tidak banyak menghabiskan biaya ketika dioperasikan," jelasnya. **(ant)**

Kepolisian Kerahkan 8.000 Personel untuk Amankan KTT G20 di Bali

Kepolisian berencana mengerahkan 8.000 lebih personel untuk mengamankan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (Leader's Summit) G20 di Bali, pada 15-16 November 2022.

Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra selepas memimpin apel gelar pasukan di Central Parking ITDC Nusa Dua, Badung, Bali, Senin, menyampaikan sebelumnya ada 6.826 polisi yang disiapkan, tetapi ada instruksi dari Mabes Polri untuk menambah 20 persen dari angka semula.

"Untuk KTT direncanakan sekitar 6.826 personel. Itu yang sudah kami setting, tetapi kemarin kami mendapat instruksi dari Mabes Polri (jumlahnya) akan bertambah 20 persen," kata Kapolda Bali menjawab pertanyaan ANTARA.

Jika penambahan 20 persen itu terwujud, maka ada tambahan 1.365 polisi yang bakal bertugas mengamankan rangkaian KTT G20 di Bali. Dengan demikian, total polisi yang dikerahkan untuk



G20
INDONESIA
2022

mengamankan KTT G20 kemungkinan mencapai 8.191 personel.

Walaupun demikian, Putu Jayan menyebut tambahan polisi itu bakal menjadi pasukan cadangan.

Dari ribuan polisi yang bakal bertugas mengamankan rangkaian KTT G20 di Bali, Kapolda menyampaikan pasukan itu merupakan gabungan dari Polda Bali dan BKO Mabes Polri.

"Kalau hanya dari polda, personel kami memang mencapai, tetapi nanti kegiatan rutin tidak bisa kami laksanakan. Oleh karena itu, kami perlu back up dari Mabes Polri untuk melengkapi jumlah personel yang dibutuhkan," kata Putu Jayan.

Sementara itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana



Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra (kiri) mengecek kesiapan jajaran polisi saat apel gelar pasukan untuk pengamanan G20 di Central Parking ITDC Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (12/9/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Mayjen TNI Sonny Aprianto selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Bali untuk G20 pada 16 Juni 2022 menyampaikan pihaknya berencana mengerahkan 6.000 prajurit untuk membantu kepolisian mengamankan kegiatan KTT G20 di Bali.

"Untuk kekuatan di wilayah kami, Kodam IX/Udayana sekitar

6.000 personel. Itu yang nanti tergelar untuk Satgas Pengamanan Wilayah," kata Sonny saat ditemui selepas simulasi pengamanan KTT G20 di Denpasar pada 16 Juni 2022.

Di luar itu, Kodam IX/Udayana bakal mengerahkan 2.000 prajurit untuk siaga mengantisipasi bencana alam. (ant)

ITDC Group Tingkatkan Kualitas Utilitas "The Nusa Dua" Jelang KTT G20



Aktivitas ITDC Utilitas di The Nusa Dua. ANTARA/HO-ITDC

PT ITDC Nusantara Utilitas (ITDC Utilitas) terus berupaya menjaga dan meningkatkan pengelolaan utilitas sesuai Standart Level Agreement (SLA) di Kawasan The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, menjelang puncak KTT G20 pada 15-16 November 2022.

"Tugas kami adalah menjamin dan memastikan tidak terjadi

penurunan kualitas lingkungan akibat air limbah dalam sistem operasional kawasan The Nusa Dua," ujar Direktur Utama ITDC Utilitas AA Istri Ratna Dewi dalam keterangan yang diterima di Badung, Minggu.

Pihaknya memiliki tanggung jawab menjaga kualitas air irigasi dan limbah di kawasan agar tetap

bersih dan tidak terjadi pencemaran air dan lingkungan selama penyelenggaraan G20, dengan mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Salah satunya adalah penyediaan pengelolaan air limbah dan air irigasi terintegrasi yang berpusat di Lagoon.

"Kami juga mengoptimalkan sistem pengolahan air limbah sehingga tidak ada air yang terbuang ke badan air," katanya.

Lagoon ITDC memiliki luas lahan 20 hektare dan luas basah 13,5 hektare serta dijalankan menggunakan Teknologi Waste Stabilization Ponds (WSP) dengan kapasitas maksimal 10.000 m3 per hari.

Dalam kegiatan operasionalnya, ITDC Utilitas menerapkan standar minimal kualitas olahan air limbah yang mengacu pada Peraturan Gubernur Bali No 16 tahun 2016 perihal Baku Mutu Lingkungan

Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

"Sebelum masa pandemi saat okupansi rata-rata kawasan sebesar 75 persen, Lagoon mengolah air limbah sampai dengan 6.000 m3 per hari yang berasal dari semua air limbah yang dihasilkan tenant di kawasan The Nusa Dua," ungkap Ratna Dewi.

Setelah semua air limbah itu diolah di Lagoon, lebih dari 90 persen air olahan tersebut telah dimanfaatkan untuk penyiraman area taman dalam kawasan.

"Dengan integrasi sistem pengolahan air limbah dan air irigasi ini, saya tegaskan tidak ada residu dari limbah cair yang terbuang ke lingkungan, sehingga konsep zero waste dan sustainable development yang merupakan nilai dari ITDC sebagai pengembang destinasi dapat terwujud," ujarnya. (ant)